

**ARAHAN BENTUK, KEGIATAN DAN KELEMBAGAAN  
KERJASAMA PADA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  
PANTAI PARANGTRITIS**

Oleh :  
**MIRA RACHMI ADIYANTI**  
**L2D 098 448**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

## ABSTRAKSI

Obyek wisata pantai Parangtritis yang terletak di desa Parangtritis, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul ini merupakan obyek dan daya tarik wisata andalan untuk Kabupaten Bantul pada khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada umumnya karena Yogyakarta merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) kedua setelah Bali. Pantai ini memiliki kelebihan, antara lain pemandangan alam laut dan pantai dan lingkungan alam sekitar yang indah; keterjangkauan yang mudah; citra/image Parangtritis; atraksi wisata yang beraneka ragam; terdapat sarana dan prasarana yang tersedia sehingga mengalami perkembangan. Namun, dalam perkembangan obyek wisata pantai Parangtritis ini muncul permasalahan utama yang timbul, yaitu kurang optimalnya bentuk, kegiatan dan kelembagaan kerjasama pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis.

Untuk mengatasinya, terdapat tujuan dan sasaran yang harus ditempuh pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis. Adapun tujuannya adalah mengkaji bentuk, kegiatan dan kelembagaan kerjasama pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai, antara lain mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana yang ada di pantai Parangtritis; menentukan prioritas jenis kerjasama, jenis kegiatan yang dikerjasamakan, dan bentuk kerjasama pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis; menentukan kelembagaan yang sesuai pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis; merumuskan keterkaitan antara jenis dan bentuk kerjasama dengan pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis; memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang berupa arahan bentuk, kegiatan dan kelembagaan kerjasama pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis

Untuk itu, diperlukan empat teknik analisis dalam studi ini, yaitu (1) analisis kondisi sarana dan prasarana yang ada di pantai Parangtritis yang dilakukan secara deskriptif; (2) analisis prioritas jenis kerjasama, jenis kegiatan yang dikerjasamakan dan bentuk kerjasama pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis yang dilakukan dengan menggunakan metode pra AHP dan metode AHP (Analytical Hierarchy Process); (3) analisis kelembagaan yang sesuai pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT; (4) rumusan keterkaitan antara jenis dan bentuk kerjasama dengan pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis yang dilakukan secara deskriptif.

Dari keseluruhan analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada di pantai Parangtritis masih perlu adanya perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan lebih lanjut; prioritas jenis kerjasama yang sesuai untuk pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis adalah kerjasama kompleks; prioritas jenis kegiatan yang dikerjasamakan pada pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis adalah jaringan jalan, sistem komunikasi, toko cinderamata, sarana akomodasi dan sarana hiburan; prioritas bentuk kerjasama untuk pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis adalah pada UPD (Unit Pengelolaan Daerah) dan BOO (Build-Operate-Own); dilihat dari segi kelembagaan yang menggunakan analisis SWOT untuk pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis, maka didapatkan matriks EFAS dengan skor 2,85 dan matriks IFAS dengan skor 3,20 yang berada di kuadran IV (stabilitas), yaitu pada strategi S-O; rumusan keterkaitan antara jenis dan bentuk kerjasama dengan pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis adalah sarana dan prasarana yang diprioritaskan pengelolaannya ada 5 jenis, yaitu sistem komunikasi, jaringan jalan, toko cinderamata, area parkir, dan sarana akomodasi. Pada setiap jenis sarana dan prasarana tersebut memiliki jenis dan bentuk kerjasama berbeda, yang dipengaruhi oleh fungsi dan kepentingan dari tiap sarana dan prasarana yang ada. Akan tetapi, aktor yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut secara umum sama dengan melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Masing-masing pihak yang terlibat mempunyai kepentingan yang berbeda sesuai dengan sarana dan prasarana yang dikelolanya. Sedangkan pada rekomendasi ini, ditujukan untuk pemerintah, antara lain lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di pantai Parangtritis, memerlukan pembenahan kelembagaan yang lebih baik dan terarah kepada obyek wisata pantai Parangtritis di masa mendatang; untuk masyarakat setempat, antara lain lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar obyek wisata pantai Parangtritis setiap saat, lebih memelihara sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik; dan untuk para investor, antara lain lebih memperhatikan situasi dan kondisi dari pantai Parangtritis yang akan dikembangkan, ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendirikan bangunan melalui suatu kerjasama sehingga dengan adanya arahan tersebut dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Parangtritis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

**Kata kunci :** Kerjasama Pengelolaan Sarana dan Prasarana

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata telah memainkan peranan penting dalam perekonomian negara berkembang, terutama negara yang memiliki sumber pariwisata potensial. Pernyataan itu terlihat di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi yang cukup untuk menjadi daerah tujuan wisata internasional, baik yang berupa keindahan alam dan keanekaragaman budaya sehingga pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat memberikan masukan pendapatan finansial nasional yang tinggi, menggantikan pendapatan yang menurun dari sektor migas. Sektor pariwisata yang mengalami perkembangan di Indonesia adalah wisata alam karena peran alam sebagai sumber daya alam dalam kepariwisataan sangat besar dan penting yang bisa dilihat dari klasifikasi jenis obyek dan daya tarik wisata dan termotivasi dari kunjungan wisatawan baik asing atau mancanegara maupun domestik atau nusantara. Hal ini dapat dijumpai pada obyek wisata pantai Parangtritis yang terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Pantai Parangtritis merupakan obyek dan daya tarik wisata andalan untuk Kabupaten Bantul pada khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada umumnya karena Yogyakarta merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) kedua setelah Bali. Pantai ini memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain pemandangan alam laut dan pantai dan lingkungan alam sekitar yang indah; keterjangkauan yang mudah; citra/*image* Parangtritis merupakan bagian dari poros merapi-keraton-laut selatan, memiliki banyak peninggalan sejarah dengan legenda Kanjeng Ratu Kidul atau Penguasa laut Selatan dan memiliki kekayaan gumuk pasir barchan (gumuk pasir aktif) yang langka dan terbesar di Asia Tenggara; atraksi wisata yang beraneka ragam; serta terdapat sarana dan prasarana yang tersedia, yaitu sarana akomodasi, sarana peribadatan, warung/kedai, toko cinderamata, area parkir, dan jaringan jalan. Adapun keunikan dari pantai ini adalah berpasir hitam, yang merupakan kekhasan pasir pantai laut Selatan dan mempunyai ombak besar. Hal ini berbeda dengan pasir di pantai Utara (Laut Jawa) yang selain berpasir putih, juga berombak sangat landai atau kecil.

Dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut di atas, maka pantai Parangtritis ini mengalami perkembangan. Perkembangan pantai Parangtritis ini melibatkan pihak-pihak, yaitu pemerintah daerah sebagai pengelola obyek wisata pantai tersebut, masyarakat yang selama ini menyatu dengan struktur kehidupan masyarakat sekitar, baik secara keruangan maupun pola hidup masyarakat dan Kraton Yogyakarta dalam hal ini menyediakan sekaligus membebaskan tanah atau lahan miliknya untuk masyarakat atau penduduk yang ingin bermukim dan memberikan keuntungan berupa distribusi *income* yang dapat langsung dinikmati masyarakat setempat serta memberikan sumbangan pada ekonomi daerah (Pendapatan Asli Daerah).

Hal tersebut dapat dilihat dari padatnya jumlah wisatawan yang masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik untuk berkunjung ke pantai Parangtritis pada hari-hari tertentu, yaitu hari Sabtu dan Minggu, hari-hari besar nasional (seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tahun Baru Cina) dan upacara ritual atau keagamaan (seperti Upacara Labuhan, Upacara Pisungsun Jaladri dan Nenepi). Jumlah wisatawan ini selama lima tahun terakhir (tahun 1997 – 2001) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan pada tahun 1997 sebesar 1.282.700 orang, pada tahun 1998 sebesar 1.024.017 orang, pada tahun 1999 sebesar 1.370.000 orang, pada tahun 2000 sebesar 1.140.275 orang dan pada tahun 2001 sebesar 1.641.100 orang (Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2001). Namun, pada tahun 1998, tahun 2000 hingga sekarang jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan karena adanya gejolak politik lokal maupun nasional yang diwarnai menurunnya kualitas keamanan yang memicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan di tempat-tempat wisata yang mungkin dikunjungi dan berpengaruh tidak hanya terhadap pariwisata Indonesia tetapi juga memiliki pengaruh yang luas terhadap kondisi sosial perekonomian nasional, regional bahkan dunia sehingga menimbulkan keengganan para wisatawan untuk datang ke tempat-tempat wisata. Jika hal tersebut terjadi pada tahun-tahun berikutnya maka akan mengakibatkan berkurangnya kualitas pantai itu sendiri dan pada akhirnya pantai tersebut akan menjadi tempat sepi yang ditinggal wisatawan.

Munculnya dampak negatif tersebut karena dalam pelaksanaan pengelolaan pantai Parangtritis, *Parangtritis Tourism Development Cooperation* (PTDC) sebagai badan pengelola pantai Parangtritis yang dibentuk pemerintah daerah tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan, yaitu mampu mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya; memberikan keuntungan berupa distribusi *income* yang dapat langsung

dinikmati masyarakat setempat; dan memberikan sumbangan pada ekonomi daerah (Pendapatan Asli Daerah) melainkan hanya untuk menarik retribusi bagi pengunjung Parangtritis.

Tidak lancarnya tugas PTDC ini karena kurangnya dukungan dana, juga dalam rencana pengembangan pihak PTDC harus melibatkan pihak Kraton Yogyakarta yang disebabkan banyak obyek wisata menjadi “milik” kraton. Oleh karena itu, dalam merancang pengembangan PTDC banyak menemui kesulitan. Sejak tahun 1997, PTDC dibekukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul dan pengelolaannya dikembalikan kepada PT. Aneka Dharma yang merupakan salah satu perusahaan daerah milik kabupaten Bantul. Namun, pengelolaan yang telah dilakukan oleh PT. Aneka Dharma itu tidak dapat bertahan lama sehingga tahun 1998 hingga sekarang pengelolaan pantai Parangtritis akhirnya dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Sedangkan obyek wisata yang dikelola secara langsung oleh Kraton Yogyakarta, antara lain makam Syech Bela Belu, makam Syech Maulana Maghribi, petilasan Parangkusumo, pemandian air panas Parangwedang, pemandian Parangtritis dan goa Panepen. Pihak Kraton Yogyakarta ini mengutus abdi dalemnya untuk menjadi juru kunci yang menunggu dan merawatnya. Untuk itu, Kraton Yogyakarta telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten Bantul untuk mengelola obyek wisata pantai Parangtritis.

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pantai Parangtritis, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan beberapa aspek, yaitu (1) ditinjau dari aspek distribusi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan promosi atau pemasaran produk wisata pantai Parangtritis kepada para investor baik mancanegara maupun domestik;(2) ditinjau dari aspek produksi, antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata UGM bekerjasama hanya dalam melakukan suatu penelitian untuk penataan dan pengembangan obyek wisata pantai Parangtritis;(3) ditinjau dari aspek komsumsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mendapatkan keuntungan pendapatan hanya dari penarikan retribusi saja dan yang lainnya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. Selain ketiga aspek tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga telah memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat baik masyarakat sekitar pantai Parangtritis maupun masyarakat pendatang yang bermukim disekitar pantai Parangtritis, namun masyarakat masih tetap tidak mempedulikan hal tersebut karena masyarakat mengetahui bahwa tanah atau lahan disekitar pantai